


# KAJIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM 2005 TERHADAP KEMISKINAN

*Mohamad Ikhsan  
M. Herman Sulistyio  
Teguh Dartanto  
Usman*



## 1. PENDAHULUAN

Penentuan harga energi di Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme pasar melainkan ditetapkan secara administrasi oleh pemerintah. Dalam penentuan harga energi ada empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

- a) tujuan efisiensi ekonomi : untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara cadangan minyak untuk keperluan ekspor, khususnya dengan mendorong pasar domestik agar mensubstitusikan konsumsinya dengan alternatif bahan bakar lain yang persediaannya lebih melimpah (gas dan batubara) atau sumber energi yang *nontradable* seperti tenaga air (*hydropower*) dan panas bumi (*geothermal*).
- b) tujuan mobilisasi dana : dengan memaksimalkan pendapatan ekspor dan pendapatan anggaran pemerintah dari ekspor sumber energi yang *tradable* seperti migas, dan batubara dan memungkinkan produsen dari sumber-sumber energi untuk menutupi biaya ekonominya dan memperoleh sumber-sumber dana untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan.
- c) tujuan sosial (pemerataan) : mendorong pemerataan melalui perluasan akses bagi kebutuhan

pokok yang bergantung pada energi seperti penerangan, memasak dan transportasi umum.

- d) tujuan kelestarian lingkungan: mendorong agar pencemaran lingkungan seminim mungkin sebagai dampak pembakaran sumber sumber energi.

Keempat tujuan di atas merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan di atas, sehingga kemungkinan bentrokan antar tujuan dapat diatasi. Keempatnya tidak mungkin dicapai sekaligus karena konflik antar tujuan pasti akan terjadi. Sebagai contoh studi yang dilakukan Pitt (1985) menunjukkan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan praktis tidak tercapai. Lebih jauh lagi, **Tabel 1** menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pun tidak tercapai. Dekomposisi indeks Gini untuk komponen BBM kecuali minyak tanah umum justru mendorong pemburukan distribusi pendapatan.

**Tabel 1**  
**Dekomposisi Elastisitas Gini, 2002**

<b>Sumber</b>	<b>Total</b>	<b>Kota</b>	<b>Desa</b>
<b><i>Inequility Increasing Sources</i></b>			
Listrik	*	*	1,25
Telepon	1,19	1,54	2,29
Air	1,5	1,268	1,358
Premium	1,91	1,68	2,49
Solar	3	2,51	5,9
Transportasi Umum Desa	*	*	1,28
<b><i>Inequility Neutral Sources</i></b>			
Listrik	1,09	0,956	*
Transportasi Umum	1,1	*	*
<b><i>Inequility Decreasing Sources</i></b>			
Kerosin	0,199	-0,08	- 0767
Transportasi Umum Kota	*	0,88	*

Sumber: Estimasi Staf LPEM FEUI

Walaupun secara ekonomi teknis, membenaran dalam penyesuaian harga BBM sangat valid tetapi secara politik proses ini tidak mudah dilakukan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di semua negara berkembang yang menganut pola intervensi harga. Argumentasi politik terkait dengan beberapa hal antara lain, pertama, adanya dampak distribusi sebagai akibat penyesuaian harga tersebut terutama dari kelompok kelas menengah. Kedua, proses penyesuaian ini sering ditumpangi oleh kepentingan politik lain.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, Pemerintah melakukan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menetapkan kenaikan BBM rata-rata 29 persen per-1 Maret 2005. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar (*grand strategy*) untuk mengalihkan subsidi BBM dari subsidi komoditas menuju subsidi langsung atau pembangunan. Walaupun tujuan kebijakan penarikan subsidi BBM sangat positif, namun kenaikan harga BBM kembali mengundang reaksi kontra dari masyarakat. Alasannya adalah dampak *inflatoir* yang menurunkan daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Secara psikologis, masyarakat beranggapan kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga barang secara luas (inflasi). **Tabel 2** menunjukkan kenaikan harga BBM per-1 Maret 2005. Kenaikan tertinggi terdapat pada minyak diesel yaitu sebesar 39,39 persen. Minyak tanah yang merupakan konsumsi golongan masyarakat bawah tidak mengalami kenaikan.

**Tabel 2**  
**Kenaikan Harga BBM per- 1 Maret 2005**

Jenis BBM	Lama	Baru	Naik (%)
Minyak Tanah Rumah Tangga	700	700	0,00
Minyak Tanah Industri	1800	2200	22,22
Premium	1810	2400	32,60
Solar Untuk Transportasi	1650	2100	27,27
Solar Untuk Industri	1650	2200	33,33
Minyak Diesel	1650	2300	39,39
Minyak Bakar	1650	2300	39,39

Sumber: Koran Tempo 1 Maret 2005 berdasarkan penjelasan pemerintah pada tanggal 28 Februari 2005

Secara logis proses penyesuaian ini akan menimbulkan persoalan penurunan daya beli khususnya dalam jangka pendek namun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Bagi kelompok rumah tangga miskin atau yang berpendapatan rendah, beban langsung cenderung lebih kecil mengingat porsi konsumsi energi termasuk BBM dalam total pengeluaran. **Tabel 3** menunjukkan porsi pengeluaran energi berdasarkan kelompok pendapatan dimana cenderung meningkat sesuai dengan kelas pendapatan walaupun mengalami penurunan pada kelompok pendapatan teratas.

Tetapi walaupun demikian kelompok rumah tangga terbawah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengatasi dampak kenaikan ini terutama menghadapi masalah *cashflow* jangka pendek. Keadaan ini mengundang timbulnya permintaan akan kebijakan kompensasi. Mengutip hasil analisis kuantitatif yang dilakukan oleh SMERU, program raskin (beras bagi kelompok miskin) merupakan kebijakan yang paling efektif dalam mengatasi masalah *cashflow* jangka pendek bagi kelompok miskin.

**Tabel 3**  
**Konsumsi BBM dan Listrik berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Jenis Energi	Daerah	Kelompok Pengeluaran					
		A	B	C	D	E	F
Minyak Tanah	Kota	3,87	3,16	1,83	0,71	0,22	0,05
	Desa	2,29	2,49	2,18	1,27	0,37	0,15
	K + D	2,58	2,75	1,92	0,77	0,23	0,05
Listrik	Kota	2,62	2,89	2,91	2,74	2,64	2,20
	Desa	1,71	1,93	1,89	1,66	1,02	0,50
	K + D	1,88	2,31	2,66	2,62	2,55	2,11
Bensin	Kota	0,33	1,03	1,52	1,99	2,77	2,26
	Desa	0,23	0,63	1,32	1,70	1,07	1,50
	K + D	0,25	0,79	1,48	1,96	2,67	2,22
LPG	Kota	0,07	0,29	0,65	0,74	0,69	0,38
	Desa	0,04	0,10	0,28	0,34	0,26	0,11
	K + D	0,04	0,17	0,56	0,70	0,67	0,36
Solar	Kota	0,00	0,02	0,03	0,08	0,10	0,07
	Desa	0,01	0,03	0,08	0,58	0,32	0,01
	K + D	0,01	0,02	0,05	0,13	0,12	0,06

Sumber :- Susenas kor tahun 2002

Keterangan:

A. Kons/kap <= Rp 100.000

B. Rp 100.000 < kons/kap <= Rp 250.000

C. Rp 250.000 < kons/kap <= Rp 500.000

D. Rp 500.000 < kons/kap <= Rp 1.000.000

E. Rp 1.000.000 < Kons/kap <= Rp 2.000.000

F. Kons/kap > Rp 2.000.000

Perubahan harga jual domestik BBM akan memberikan dampak tambahan bagi APBN. Timbul pertanyaan kemudian program apakah yang bisa digunakan untuk mengatasi baik persoalan *cashflow* jangka pendek dan sekaligus berguna untuk sebagai investasi jangka panjang. Analisis kuantitatif yang dilakukan LPEM (2003) menunjukkan bahwa pendidikan dan infrastruktur pedesaan merupakan dua komponen yang signifikan mempengaruhi probabilitas suatu rumah tangga untuk masuk atau ke luar dalam perangkap kemiskinan. Tetapi pembangunan infrastruktur mempunyai *time lag* untuk menghasilkan dampak terhadap penurunan kemiskinan. Hanya pengeluaran pendidikan – khususnya untuk SD dimana tingkat partisipasi rumah tangga miskin sama dengan rumah tangga bukan miskin akan secara efektif mengatasi masalah jangka pendek dan panjang. Pemberian beasiswa dan pembebasan SPP akan mengurangi pengurangan rumah tangga miskin dan penghematannya bisa dipakai untuk mengkompensasi kenaikan tingkat harga umum maupun tambahan konsumsi lain.

Isu lain yang muncul sejauhmana tingkat keefektifitas dari program kompensasi. Studi ini selain melihat dampak kenaikan BBM terhadap tingkat kemiskinan tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya pemerintah untuk memfokuskan upaya untuk memperbaiki tingkat efektifitas program kompensasi ini.

## 2. MENGAPA HARGA BBM MESTI DINAIKKAN

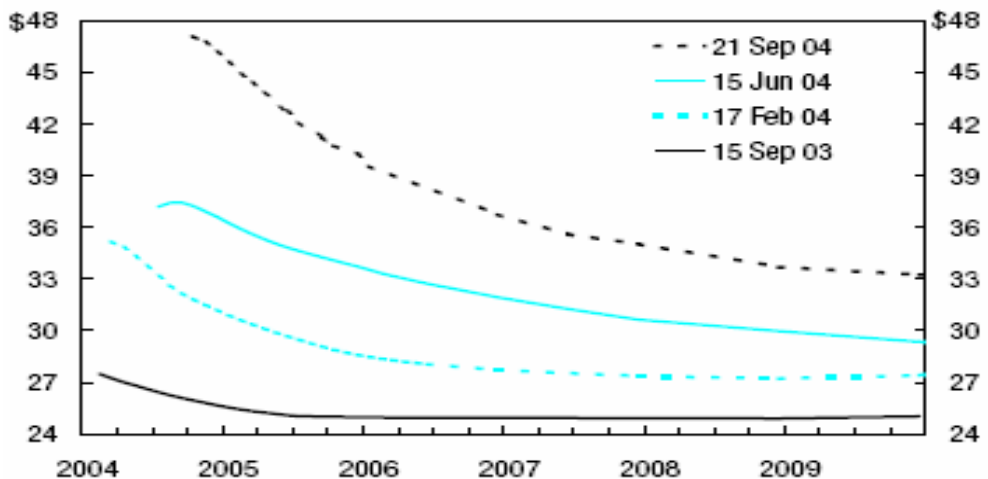
Secara umum terdapat dua kelompok argumen untuk membenarkan kenaikan harga BBM yaitu alasan jangka panjang dan alasan jangka pendek.

### 2.1. Alasan Jangka Pendek

Berdasarkan alasan jangka pendek terdapat beberapa alasan yang sangat kuat untuk membenarkan kenaikan harga ini yaitu :

- Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai US\$ 50 per barrel, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US\$ 24 per barrel. Harga *future market* memberikan indikasi bahwa harga minyak dunia akan berada di sekitar US\$ 35- US\$ 40 per barrel sepanjang tahun 2005 dan kemungkinan tetap bertahan pada tahun 2006. Bahkan jika dilihat dari harga setelah penyesuaian sekarang, elemen subsidiya masih cukup besar. Mempertahankan disparitas harga yang cukup mencolok akan menimbulkan dampak yang makin luas seperti penyeludupan dan sebagainya.

**Gambar 1**  
**Harga Future Market dari Minyak Mentah**



Source : Bloomberg

- Perbedaan harga ini kemudian menimbulkan pembengkakan subsidi. Jika harga bertahan minyak bumi pada rata-rata US\$ 35 per barrel, subsidi akan meningkat menjadi Rp 60,3 triliun dan diperkirakan akan melebihi jumlah tersebut mengingat harga minyak bumi sekarang telah mencapai US\$ 50 per barrel. Penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah masih menyisihkan subsidi BBM sekitar Rp 39 triliun. Subsidi BBM ini juga menyebabkan membengkaknya defisit APBN. Untuk APBN 2005, jika harga BBM tidak dinaikkan subsidi membengkak dari 0,7% dari PDB dengan tahun dasar 2000 menjadi 1,3% dari PDB. Penyesuaian ini dengan sebagian penghematan digunakan untuk dana kompensasi akan dapat menekan defisit menjadi 1% dan sekaligus mengurangi kebutuhan pembiayaan baru baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.

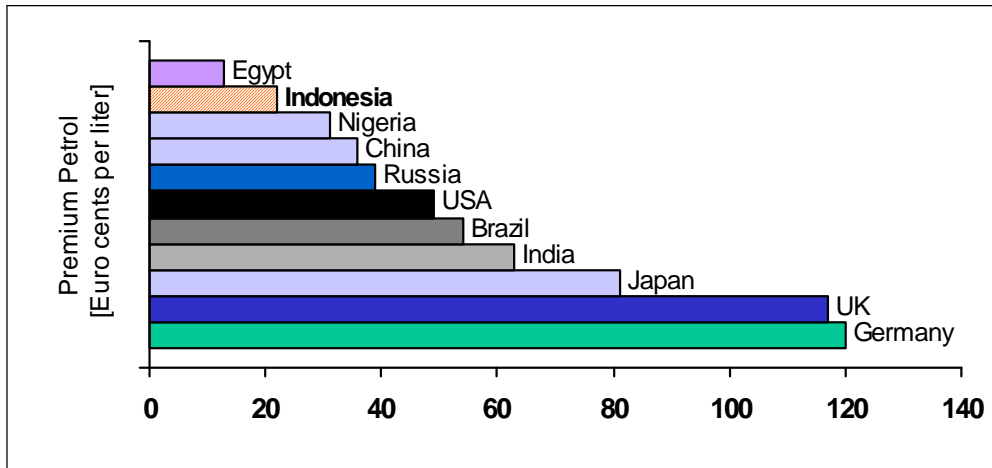
**Tabel 4**  
**Tambahan Defisit APBN 2005 Akibat Kenaikan Harga Minyak**

<b>Harga Minyak</b>	<b>\$28/bbl</b>	<b>\$30/bbl</b>	<b>\$32/bbl</b>	<b>\$38/bbl</b>	<b>\$40/bbl</b>
Rp (trilyun)	2,9	4,3	5,7	8,5	11,4
% thd PDB	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4

*Sumber:* Estimasi Staf LPEM FEUI

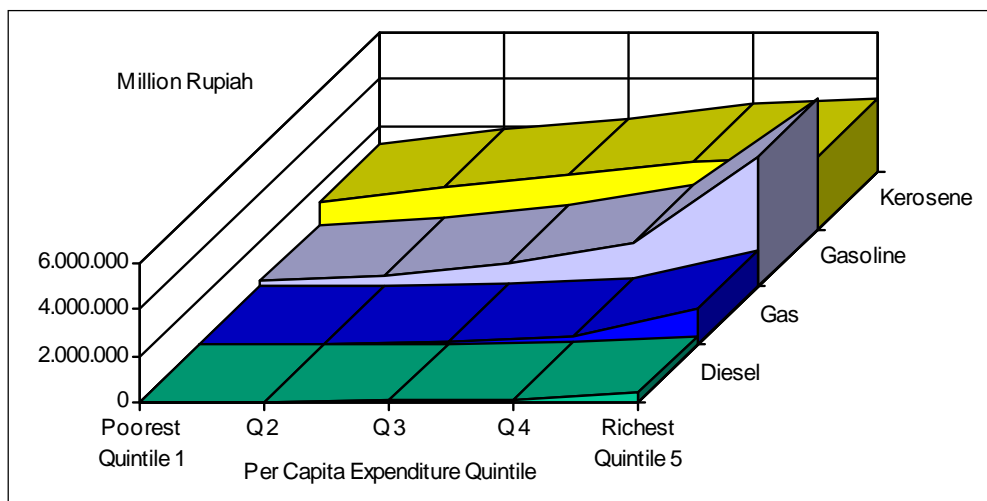
- Penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor Timur – yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia – harga domestik BBM jauh di atas harga BBM di Indonesia (**Gambar 2** Perbandingan harga BBM antar negara). Penyesuaian harga BBM tidak mengganggu daya saing komoditi Indonesia di pasar internasional karena harga BBM di negara pesaing Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBM domestik.

Gambar 2  
Perbandingan Harga Premium di berbagai Negara



- Harga domestik yang terlalu rendah juga telah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004 lalu pertumbuhan BBM tumbuh antara 5% per tahun. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan.
- Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas termasuk untuk minyak tanah sekalipun. Pangsa konsumsi BBM non minyak tanah terhadap pengeluaran rumah tangga miskin berdasarkan data Susenas kurang dari 2 persen. Memindahkan subsidi dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok rumah tangga miskin akan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga akan memudahkan tujuan pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan kata lain, membiarkan kebijakan harga BBM yang subsidinya dinikmati kelompok rumah tangga mampu sama saja dengan menciptakan kemiskinan struktural yaitu makin timpangnya distribusi pendapatan.

Gambar 3  
Distribusi Subsidi BBM menurut Kelas Pendapatan



Sumber : Susenas 2002

- Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek. Dalam hal alokasi untuk pendidikan, tambahan dana ini akan mempercepat pemenuhan amanat UUD 45 dan UU Sistem Pendidikan Nasional yang meminta pemerintah untuk menempatkan prioritas anggaran bagi pendidikan. Alokasi untuk kesehatan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi amanah UU Sistem Jaminan Sosial.

## 2.2. Alasan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi yang dewasa ini tidak rasional. Harga relatif BBM dibandingkan dengan batubara atau gas yang lebih murah menyebabkan insentif penggunaan sumber energi yang lebih murah dan sumber domestik relatif melimpah berkurang. Prasyarat utama untuk mendorong penggunaan sumber energi ini (termasuk yang *renewable*) adalah mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.

Di samping itu dari sisi lingkungan hidup BBM tergolong sumber energi yang relatif kotor. Koreksi harga BBM akan mengurangi konsumsi BBM dan akan mendorong konsumsi sumber energi yang ramah lingkungan seperti gas atau sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi.



### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menghitung dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan pada tahun 2005 adalah mengintegrasikan hasil estimasi Model *Computable General Equilibrium* (INDOCEEM<sup>1</sup>) dengan metode dampak kemiskinan yang telah dikembangkan LPEM FEUI.

#### 3.1. Model INDOCEEM (*Indonesian Comprehensive Energy-Economy Model*)

Sama seperti model Kesembangan Umum Terapan lainnya, INDOCEEM secara lengkap memasukkan semua keterkaitan dan interaksi antara sektor-sektor produksi dengan sektor-sektor konsumsi di dalam perekonomian. Untuk dapat mengkaji dampak dari kebijakan sektor energi secara komprehensif, INDOCEEM telah mencakup beberapa karakteristik sektor migas dan listrik. Untuk sektor migas, *output* didisagregasi menjadi enam komoditi. Dengan demikian model dapat mengakomodasi perubahan harga yang berbeda-beda bagi setiap komponen dari BBM bagi masing-masing golongan konsumen. Model INDOCEEM ini terdiri dari tiga bagian – data, teori dan parameter – yang menyatu ke dalam bentuk sistem persamaan model. Persamaan-persamaan model menjelaskan bagaimana produsen dan konsumen merespon setiap terjadinya perubahan kebijakan, misalnya, kenaikan BBM. INDOCEEM menggunakan teori ekonomi untuk membentuk perilaku dari produsen, konsumen, sektor luar negeri dan investor. Model ini juga mencakup sektor pemerintah yang perilaku penerimaan dan pengeluarannya dimodelkan secara terpisah. Inti dari model INDOCEEM adalah databasenya yang menunjukkan bagaimana setiap sektor dalam perekonomian terkait dengan sektor lainnya. Database yang digunakan INDOCEEM diambil dari tabel *input-output* tahun 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel ini menggambarkan interaksi antara konsumen, produsen, pemerintah dan sektor luar negeri dalam kondisi keseimbangan.

#### 3.2. Metodologi Perhitungan Kemiskinan dan Dampak Kenaikan BBM

##### 3.2.1. Metodologi Perhitungan Kemiskinan

Perhitungan dampak terhadap kemiskinan mengutilisasi indeks yang telah dipakai secara umum dan yang konsisten menurut teori ekonomi dan dapat dioperasionalkan.

---

<sup>1</sup> INDOCEEM (**I**ndonesian **C**omprehensive **E**nergy-**E**conomy **M**odel) merupakan model KUT tingkat sektoral dari perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu versi dari model INDORANI. Model INDORANI, dan juga INDOCEEM, diturunkan dari model KUT ORANI yang pertama kali dikembangkan oleh IMPACT Project di Monash University Australia, tetapi dikembangkan lebih lanjut dengan sejumlah penyesuaian terhadap struktur perekonomian Indonesia.

Secara matematis formula tersebut yang dikenal sebagai FGT *poverty index* dapat ditulis sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum \left[ \frac{(z - y_i)}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan,

$n$  = jumlah penduduk

$y_i$  = pendapatan/pengeluaran perkapita penduduk miskin ke- $i$

$z$  = garis kemiskinan.

FGT indeks akan menjadi *Head-Count Index* (HCI) jika  $\alpha=0$ ; akan menjadi *Poverty Gap Index* (PGI) jika  $\alpha=1$ ; *Poverty Severity Index* atau *Square Poverty Gap* (SPgap) jika  $\alpha=2$ .

### 3.2.2. Metodologi Perhitungan Distribusi Pendapatan

Dalam mengukur dampak distribusi pendapatan digunakan Indeks Theil yang termasuk dalam famili ukuran ketimpangan *Generalized Entropy* (GE)<sup>2</sup>, dimana rumus umumnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{y_i}{y} \right)^{\alpha} - 1 \right]$$

dimana adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran). Parameter  $\alpha$  dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan (pengeluaran), dan dapat mengambil setiap nilai riil. Untuk nilai  $\alpha$  yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai  $\alpha$  yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai  $\alpha$  yang paling umum dipakai adalah 0, 1, dan 2. Dalam penelitian ini nilai  $\alpha$  yang dipakai adalah 1 atau GE(1) atau lebih dikenal dengan sebutan indeks Theil's T, yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE(1) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{y} \ln \left( \frac{y_i}{y} \right)$$

### 3.2.3. Metodologi Perhitungan Dampak Kenaikan BBM terhadap Kemiskinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan harga akan berbengaruh kepada kemiskinan. Secara teoritis kenaikan harga akan menimbulkan dampak yang dikenal dengan istilah *substitution effect* dan *income effect*. Kenaikan harga akan membuat pelaku ekonomi untuk melakukan substitusi dari komoditi yang mengalami kenaikan harga kepada komoditi yang harganya lebih murah. Namun besarnya substitusi ini akan sangat tergantung pada

---

<sup>2</sup> World Bank Institute (2002). *Introduction to Poverty Analysis*.

jenis barang. Seandainya barang tersebut adalah jenis yang tak tergantikan atau *necessity goods* maka dapat diduga efek substitusinya tidak terlalu besar. Dampak kedua yang akan diterima pelaku ekonomi adalah *income effect*. Kenaikan harga akan membuat pendapatan riil mengalami penurunan. Sehingga dapat diduga bahwa keranjang konsumsi dari pelaku ekonomi akan menurun atau dengan kata lain daya beli masyarakat menjadi turun. Secara analitikal, perubahan kesejahteraan  $\frac{3}{4}$  dalam hal ini perubahan daya beli atau pengeluaran konsumsi  $\frac{3}{4}$  sebagai akibat perubahan harga dapat dibagi menjadi dua *impact*<sup>3</sup>. *Immediate Impact*, atau dampak segera yaitu perubahan kesejahteraan karena kenaikan harga suatu komoditi dengan mengasumsikan tidak ada perubahan dalam perilaku produsen atau konsumen. Perubahan kesejahteraan sebagai akibat perubahan harga dapat dihitung melalui formula :

$$\Delta W_i^1 / x_{0i} = \Delta p_{0r}^p / p_{0r}^p PR_{ir} - \Delta p_{0r}^c / p_{0r}^c CR_{ir}$$

dengan,

$DW_i^1$  = Perubahan tingkat kesejahteraan untuk rumah tangga  $i$  sebagai akibat perubahan harga.

$x_{0i}$  = Tingkat pendapatan awal dari rumah tangga  $i$ .

$Dp_{0r}^p$  = Harga awal untuk menghitung nilai produksi di daerah  $r$ .

$Dp_{0r}^c$  = Harga awal untuk menghitung nilai konsumsi beras di daerah  $r$ .

$PR_{ir}$  = Nilai produksi rumah tangga  $i$  sebagai persentase terhadap total pendapatan atau pengeluaran.

$CR_{ir}$  = Nilai konsumsi rumah tangga  $i$  sebagai persentase terhadap total pendapatan atau pengeluaran.

*Short Run Impact*. Perhitungan di atas masih tergolong kasar karena hanya melihat dampak jangka pendek dengan tanpa memperhitungkan reaksi dari konsumen dan produsen sebagai akibat perubahan harga. Pengembangan lebih lanjut adalah dengan perhitungan yang lebih kompleks yang memasukkan elastisitas permintaan dan penawaran konsumen dan produsen yang diinterpretasikan sebagai *after response income effect*. Perubahan kesejahteraan yang diakibatkannya itu dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\Delta W_i^2 / x_{0i} = \Delta p_{0r}^p / p_{0r}^p PR_{ir} + \frac{1}{2} (\Delta p_{0r}^p / p_{0r}^p)^2 PR_{ir} \epsilon_{rr}^s - \Delta p_{0r}^c / p_{0r}^c CR_{ir} - \frac{1}{2} (\Delta p_{0r}^c / p_{0r}^c)^2 CR_{ir} \epsilon_{rr}^d$$

<sup>3</sup> Lihat Minot dan Goletti (2000) untuk derivasi lengkap dari formula tersebut. Formula di atas merupakan pengembangan dari formula yang dikembangkan oleh Deaton (1989).

dengan,

$DW_i^2 =$  *Second order approximation* dalam perubahan tingkat kesejahteraan untuk rumah tangga  $i$  sebagai akibat perubahan harga.

$e_{rr}^s =$  Elastisitas penawaran.

$e_{rr}^d =$  Elastisitas permintaan.

Nilai  $PR_{ir}$  dan  $Dp_{0r}^c$  diasumsikan bernilai nol karena tidak ada rumah tangga yang memproduksi BBM dan menjualnya kepada yang lain.

Tahap selanjutnya adalah melihat dampak kenaikan harga terhadap indeks kemiskinan. Asumsi yang digunakan adalah sama dengan bagian sebelumnya dimana saat ini kita memiliki pengeluaran konsumsi yang baru  $\frac{3}{4}$  setelah disesuaikan dengan proporsi perubahan daya beli  $\frac{3}{4}$  kemudian disimulasikan terhadap garis kemiskinan mula-mula. Dengan adanya kebijakan kompensasi terhadap persentase tertentu jumlah penduduk termiskin, asumsinya adalah daya beli kelompok ini kembali meningkat sebesar kompensasi yang diberikan tersebut. Dengan demikian kita dapat memperoleh gambaran indeks kemiskinan akibat kenaikan harga BBM serta indeks kemiskinan dari kebijakan kompensasi setelah ada kenaikan harga.

Sistematika Metodologi Penelitian Dampak Kenaikan BBM terdapat lima langkah untuk menghitung dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan:

1. Pertama: menghitung kondisi awal kemiskinan dengan menggunakan data Susenas 2002<sup>4</sup>.
2. Kedua: menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga barang-barang lainnya melalui model INDOCEEM.<sup>5</sup>
3. Ketiga: data kenaikan harga barang lain yang diperoleh dari INDOCEEM dimasukkan dalam data Susenas 2002 untuk menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan rumah tangga.
4. Keempat: menghitung ulang kemiskinan setelah adanya dampak kenaikan harga BBM 2005.

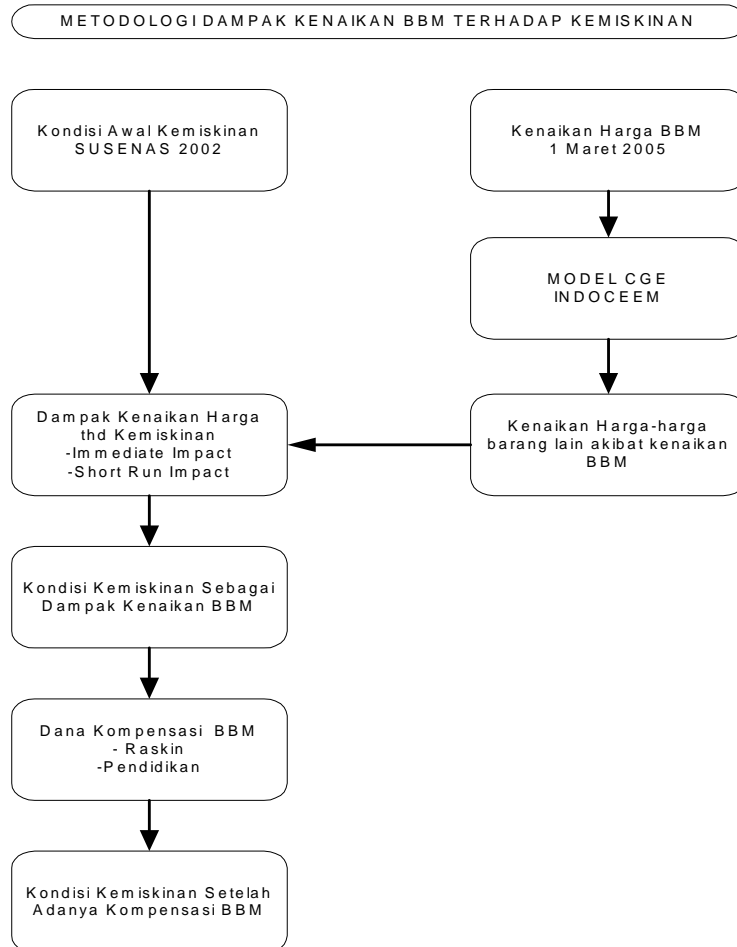
---

<sup>4</sup> Penggunaan data Susenas 2002 karena data ini merupakan data Susenas yang memiliki modul konsumsi, sedangkan Susenas 2003 dan 2004 tidak terdapat modul konsumsi secara lengkap. Selain itu data pengeluaran dalam *core* Susenas umumnya selalu lebih rendah dari modul konsumsi. Penyesuaian dalam data dapat mengganggu kredibilitas dari hasil simulasi. Dalam kasus ini penggunaan database sebetulnya kurang begitu relevan mengingat tujuan dari studi hanya melihat dampak – yang lebih melihat kecenderungan – bukan *magnitude* perubahan.

<sup>5</sup> Studi ini mengutilisasi garis kemiskinan yang sedikit berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh BPS. Tetapi sekali lagi analisis ini tidak begitu sensitif dengan penggunaan garis kemiskinan yang berbeda.

5. Kelima: memberikan kompensasi berupa Raskin dan Beasiswa Pendidikan terhadap keluarga miskin dan menghitung ulang dampak kompensasi BBM terhadap kemiskinan.

**Gambar 4**  
**Alur Metodologi Perhitungan Dampak Kenaikan BBM 2005 terhadap Kemiskinan**



#### 4. DAMPAK KENAikan HARGA BBM TERHADAP INFLASI

Dengan menggunakan model ekonomi keseimbangan umum (CGE) LPEM-UI, secara keseluruhan dampak inflasi dari kenaikan BBM Maret 2005 adalah sebesar 0,9718 persen.<sup>6</sup> Dampak ini lebih kecil dari dampak inflasi dari akumulasi kenaikan harga BBM selama tahun 2002 yang, dihitung dengan model yang sama, mencapai 2,02 persen. Dampak

<sup>6</sup> Hasil perhitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh metoda lain. Misalnya Bank Dunia memperkirakan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM 30% ini mencapai 1,2%

kenaikan harga BBM Maret 2005 terhadap harga-harga produk beberapa industri strategis dapat dilihat **Tabel 5**. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa harga *output* sektor transportasi khususnya angkutan darat, laut dan kereta api terpengaruh paling besar, naik mencapai 2,8 sampai 4,2 persen untuk tahun 2005. Hal ini bisa dimaklumi karena BBM merupakan *input* utama bagi sektor transportasi. Angkutan udara tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga BBM karena avtur sebagai bahan bakar utama dari pesawat harganya tidak disubsidi sehingga tidak terpengaruh dengan adanya pencabutan subsidi. Sektor kedua yang cukup besar terpengaruh terhadap adanya pencabutan subsidi BBM adalah sektor konstruksi yaitu naik sebesar 2,04 persen. Sektor ketiga yang terkena dampak terbesar akibat pencabutan subsidi BBM adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 1 persen. Sektor atau komoditas yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga seperti gula, beras, minyak goreng, sayuran tidak banyak terpengaruh oleh pencabutan subsidi BBM. Komoditas sektor pertanian yang terkena dampak terbesar dari kenaikan harga BBM adalah perikanan laut yaitu sekitar 1 persen. Hal ini disebabkan karena sektor/komoditas ini membutuhkan BBM dalam skala besar sebagai *input* utama. Beras yang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mengalami kenaikan sekitar 0,56 persen. Sedangkan gula mengalami kenaikan harga sebesar 0,65 persen.

**Tabel 5**  
**Dampak Inflasi dari Kenaikan Harga BBM (%)**

Jenis Barang	Kenaikan Harga (%)	Jenis Barang	Kenaikan Harga (%)
Padi	0,23	Konstruksi	2,041
Sayuran	0,26	Perdagangan	1,025
Hasil Ternak	0,441	Restoran	0,821
Perikanan Laut	0,995	Hotel	0,767
Minyak Goreng	0,471	Angkutan Kereta Api	2,824
Beras	0,561	Angkutan Darat	4,117
Gula	0,65	Pelayaran	3,082
Pertambangan	0,798	Angkutan Air	4,21
Pupuk	0,537	Angkutan Udara	0,097
Industri Baja	0,916	Komunikasi	0,481
Listrik	0,08	Keuangan	0,522
Gas	0,325	Jasa-Jasa Lain	0,639
Air Bersih	0,477		

Sumber: Hasil Simulasi Model CGE LPEM FEUI, 2005

Perlu dicatat bahwa perhitungan ini dilakukan dengan asumsi yang konservatif agar tidak terjadi estimasi inflasi yang terlalu rendah (*under-estimated inflation*). Perhitungan dengan model ini telah memperhitungkan *first round effect* berupa: (i) kenaikan harga bensin dan minyak tanah yang langsung masuk ke *bundle* konsumsi, dan (ii) kenaikan harga solar,

disel dan minyak bakar yang dampaknya mempengaruhi kenaikan harga melalui kenaikan biaya produksi sektor-sektor pemakai energi seperti transportasi dan industri terkait lainnya. Selain itu, perhitungan di atas juga sudah memperhitungkan kemungkinan *second round effect* yang dapat muncul dalam bentuk tuntutan buruh untuk dikompensasi terhadap kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM<sup>7</sup>.

## 5. DAMPAK PSIKOLOGIS DAPAT MEMPERBESAR DAMPAK INFLASI

Estimasi dampak inflasi di atas hanya mencakup perhitungan yang wajar didasarkan pada struktur konsumsi rumah tangga dan struktur biaya produksi industri. Dengan demikian perhitungan di atas tidak memperhitungkan kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor lain seperti perilaku pengusaha untuk menggeserkan beban kenaikan harga BBM kepada konsumen dengan menaikkan harga produk mereka secara tidak wajar. Salah satu contoh upaya untuk menggeserkan beban kenaikan BBM secara tidak wajar adalah tuntutan sopir angkutan dan Organda untuk menaikkan tarif sebesar 30%. Perlu dicatat bahwa total biaya angkutan tidak hanya **biaya operasi** tapi juga ada **biaya kapital** yang sangat besar. Kalau dihitung dari biaya total biaya secara keseluruhan, biaya BBM di sektor angkutan darat rata-rata mencapai 13 persen pada akhir tahun 2001. Setelah kenaikan harga BBM tahun 2002, diperkirakan pengeluaran BBM tidak mencapai 20 persen dari total biaya produksi. Dengan demikian, kenaikan yang wajar dari tarif hanya sebesar 4,2 persen (29%, 20%=5,8%).

**Tabel 6**  
**Struktur Pengeluaran Sektor Transportasi**

Jenis Biaya	Pengeluaran Energi Terhadap Pengeluaran Total					
	Bus AK	ASDP*	Kereta Api	Kapal Laut	Pesawat Jet	Pswt. Non Jet
Penyusutan	34,4%	24,5%	5,4%	36,5%	11,9%	1,7%
Personil	15,3%	6,8%	1,6%	10,7%	3,5%	4,8%
Asuransi	3,6%	9,1%	-	4,0%	3,1%	10,7%
BBM	<b>12,5%</b>	<b>19,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>12,4%</b>	<b>24,7%</b>	<b>23,9%</b>
Pemeliharaan	11,9%	32,1%	28,3%	12,5%	30,1%	41,2%
Pengelolaan	5,4%	2,0%	36,8%	6,8%	20,3%	12,6%
Pelumas	-	3,6%	1,1%	4,3%	-	-
Pelabuhan/Terminal	0,8%	1,1%	0,6%	1,0%	3,1%	2,4%
Air Tawar	-	1,2%	-	-	-	-
Ban	15,2%	-	-	-	-	-
PKB/STNK/Kir	0,8%	-	-	-	-	-
Jasa Prasarana	-	-	22,0%	-	-	-
Penumpang	-	-	-	11,7%	3,1%	2,8%

Sumber: PUSDATIN Dephub, November 2001

ASDP\* : Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Kalau perilaku pengusaha seperti dilakukan Organda meluas ke sektor-sektor lain, maka dampak inflasi dari kenaikan BBM dapat lebih besar dari yang diestimasi di atas. Karena

<sup>7</sup> Dalam simulasi ini upah buruh diindeks terhadap inflasi, jadi upah nominal buruh diasumsikan naik mengikuti inflasi.

itu, disamping memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, pemerintah juga harus berupaya agar kenaikan harga yang terjadi di sektor-sektor ekonomi memang pada tingkat ekonominya. Artinya harga barang-barang lain, walaupun naik, harus secara wajar sesuai kenaikan yang dapat dijustifikasi oleh struktur biayanya. Di negara-negara maju, setiap kali pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mempengaruhi tingkat harga secara umum, pada saat yang sama akan dilakukan pemantauan harga (*surveilence*). Dengan demikian tidak banyak pedagang yang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan menaikkan harga di atas kenaikan biaya produksi. Dengan pemantauan harga, perekonomian terhindar dari inflasi yang tidak perlu dan masyarakat pun akan terhindar dari *margin-margin* yang tidak semestinya. Di Indonesia fungsi yang sama dapat dilakukan oleh Departemen Energi dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

## 6. SUBSIDI BBM TIDAK TEPAT SASARAN

Seperti yang ditunjukkan **Tabel 1**, subsidi BBM cenderung meningkat ketimpangan pendapatan. Akibatnya kebijakan pengurangan subsidi BBM justru sebenarnya memenuhi unsur keadilan. Selama ini pemberian subsidi untuk BBM sebenarnya tak lebih dari pemberian subsidi terus menerus kepada kelompok masyarakat menengah atas. **Tabel 7** menunjukkan bagaimana distribusi konsumsi BBM lebih tinggi pada kelompok non miskin. Perhitungan LPEM-FEUI menunjukkan bahwa untuk bensin, kelompok paling kaya (kelompok F) mengkonsumsi 9 kali lebih banyak dibandingkan kelompok pendapatan paling rendah (paling miskin=kelompok A), untuk solar kelompok non miskin bahkan mengkonsumsi 12 kali lebih banyak dibandingkan kelompok paling miskin. Namun untuk minyak tanah, kelompok paling miskin mengkonsumsi 51 kali lebih banyak dibandingkan kelompok paling kaya. Sedangkan untuk LPG kelompok paling kaya mengkonsumsi sebanyak 9 kali dibandingkan dengan kelompok paling miskin (Lihat **Tabel 3**). Implikasinya, subsidi BBM salah sasaran dan justru menguntungkan kelompok non miskin. Dari sudut pandang keadilan inilah, subsidi BBM perlu dihapus.

**Tabel 7**  
Distribusi Subsidi BBM menurut Kelompok Rumah Tangga

Kelompok Pengeluaran	BBM	Minyak Tanah
20% Terbawah	7%	10%
20% Kedua Terbawah	11%	15%
20% Di tengah	16%	20%
20% Kedua Teratas	23%	24%
20% Teratas	43%	31%

*Sumber* : Susenas 2002



## 7. DAMPAK KENAIKAN BBM DAN DANA KOMPENSASI BBM TERHADAP PENDUDUK MISKIN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan BBM akan berpengaruh kepada kemiskinan. Secara teoritis kenaikan harga BBM akan menimbulkan dampak yang dikenal dengan istilah *substitution effect* dan *income effect*. Kenaikan harga akan membuat pelaku ekonomi untuk melakukan substitusi dari komoditi yang mengalami kenaikan harga kepada komoditi substitusi yang harganya lebih murah. Namun besarnya substitusi ini akan sangat tergantung kepada jenis barang. Seandainya barang tersebut adalah barang yang tak dapat tergantikan atau *necessity goods* maka dapat diduga efek substitusinya tidak terlalu besar. Dampak kedua yang akan diterima oleh pelaku ekonomi adalah *income effect*. Kenaikan harga akan membuat pendapatan riil mengalami penurunan. Sehingga dapat diduga bahwa keranjang konsumsi dari pelaku ekonomi akan menurun. Perkiraan ini juga konsisten dengan perhitungan dampak kenaikan harga BBM terhadap pendapatan riil yang ditunjukkan oleh **Tabel 8**. Dalam tabel tersebut ditunjukkan tanpa ada program kompensasi semua kelompok pendapatan mengalami penurunan daya beli (pendapatan riil). Tetapi dengan kompensasi kepada kelompok miskin, beberapa kelompok mendapat *real gain* atau *welfare improving*.

**Tabel 8**  
**Dampak Seketika (*Immediate Impact*) dan Dampak Jangka Pendek (*Short Run Impact*)**  
**(Dana Kompensasi Diberikan kepada 17% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Status	Stl. Kenaikan Harga		Ada Kompensasi* (Tanpa Kebocoran dana)		Ada Kompensasi* (Kebocoran dana 25%)		
		BBM		imm. impact	Short run imp.	imm. impact	Short run imp.	
		imm. impact	Short run imp.					
Kota	Jawa	Miskin	-0,41	-0,41	4,03	4,03	2,92	2,92
		Hampir Miskin	-0,51	-0,50	-0,51	-0,50	-0,51	-0,50
		Tidak Miskin	-1,01	-0,98	-1,01	-0,98	-1,01	-0,98
	Luar Jawa	Miskin	-0,43	-0,43	3,65	3,66	2,63	2,63
		Hampir Miskin	-0,53	-0,52	-0,51	-0,50	-0,51	-0,51
		Tidak Miskin	-0,97	-0,94	-0,97	-0,94	-0,97	-0,94
Desa	Jawa	Miskin	-0,40	-0,40	5,15	5,15	3,76	3,77
		Hampir Miskin	-0,49	-0,48	0,04	0,05	-0,09	-0,09
		Tidak Miskin	-0,83	-0,81	-0,83	-0,81	-0,83	-0,81
	Luar Jawa	Miskin	-0,39	-0,38	4,65	4,65	3,39	3,39
		Hampir Miskin	-0,45	-0,45	0,43	0,43	0,21	0,21
		Tidak Miskin	-0,73	-0,72	-0,73	-0,72	-0,73	-0,72
Kota		Miskin	-0,42	-0,41	3,93	3,93	2,84	2,84
		Hampir Miskin	-0,52	-0,51	-0,51	-0,50	-0,51	-0,51
		Tidak Miskin	-0,99	-0,97	-0,99	-0,97	-0,99	-0,97
Desa		Miskin	-0,39	-0,39	4,91	4,91	3,58	3,59
		Hampir Miskin	-0,47	-0,47	0,22	0,23	0,05	0,05
		Tidak Miskin	-0,78	-0,77	-0,78	-0,77	-0,78	-0,77
Kota + Desa		Miskin	-0,40	-0,40	4,67	4,68	3,41	3,41
		Hampir Miskin	-0,48	-0,48	-0,02	-0,01	-0,13	-0,13
		Tidak Miskin	-0,92	-0,90	-0,92	-0,90	-0,92	-0,90

\* Kompensasi berupa raskin (20 kg/bln/kk) dan pembebasan semua biaya spp.

Untuk melihat dampak kenaikan BBM dan dampak dana kompensasi BBM terhadap penduduk miskin, LPEM-FEUI melakukan simulasi dengan asumsi dan skenario:

1. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen
2. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga pengeluaran terendah.
3. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga pengeluaran terendah. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa di masyarakat, Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar penduduk.<sup>8</sup>
4. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi. Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari hasil CGE.
5. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi. Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari hasil CGE. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa di masyarakat Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar penduduk.
6. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17% rumah tangga pengeluaran terendah.
7. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17% rumah tangga pengeluaran terendah. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa di masyarakat Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar penduduk.
8. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17% rumah tangga pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi. Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari hasil CGE.

---

<sup>8</sup> Indikasi ini terlihat dari Susenas 2002 dimana jumlah rumah tangga miskin yang menerima Raskin jauh melebihi dari alokasi rumah tangga yang ada didalam anggaran yaitu 21 juta *versus* 9,6 juta RT.

9. Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi. Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari hasil CGE. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa di masyarakat Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar penduduk.
10. Dalam simulasi di atas, diasumsikan nilai transfer dari Raskin yang diterima oleh penduduk miskin hanya Rp 1.000,- bukan Rp 2.300, yaitu selisih harga beras aktual dikurangi harga yang harus dibayar. Hasil simulasi terdapat dalam Tabel 9-12. **Tabel 9** menunjukkan kondisi kemiskinan awal sebelum ada dampak kenaikan BBM adalah 16,25 persen. Kenaikan harga BBM per-1 Maret 2005 mengakibatkan kemiskinan naik sebesar 0,24 persen menjadi 16,49 persen. Dampak kenaikan BBM akan menyebabkan penambahan orang miskin sebesar 520 ribu. Kenaikan kemiskinan yang relatif kecil sebagai akibat kenaikan BBM disebabkan karena konsumsi kelompok miskin terhadap BBM relatif kecil, sehingga pola konsumsi kelompok miskin tidak berubah. Rumah tangga miskin umumnya relatif terproteksi mengingat tiga hal. *Pertama*, pangsa konsumsi langsung BBM relatif kecil. Untuk BBM non minyak tanah, pangsa kelompok 40% terbawah kurang dari 1% dari total pendapatan. Hanya minyak tanah yang lumayan besar yaitu sekitar 2,6% dari total pengeluaran. *Kedua*, konsumsi komoditi yang sensitif terhadap kenaikan BBM pun relatif kecil seperti pengeluaran untuk transportasi. *Ketiga*, komoditi yang dominan dalam pola konsumsi rumah tangga 40% terbawah yaitu beras sebetulnya juga tidak bergerak banyak karena harga komoditi ini dijaga oleh pemerintah dan kenaikan harga BBM dilakukan pada saat siklus harga beras mengalami penurunan. Jika pemerintah memberikan kompensasi beras murah sebesar 20 kg/rumah tangga atau setara dengan Rp 20.000/rumah tangga kepada 20 persen kelompok pengeluaran terendah maka kemiskinan akan turun sebesar 2,33 persen menjadi 14,16 persen. Jika kompensasi beras murah dan beasiswa diberikan sekaligus maka kemiskinan akan turun menjadi 13,65 persen. Jika terjadi kebocoran atau korupsi terhadap kompensasi beras murah dan diasumsikan hanya 75 persen saja yang sampai ke orang miskin maka kemiskinan akan menjadi 14,71 persen. Korupsi atau penyelewengan dana kompensasi beras murah akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,55 persen (14,16 menjadi 14,71). Sedangkan, jika kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan hanya sampai 75 persen maka kemiskinan akan menjadi 14,36 persen. Dari simulasi ini dapat dilihat bahwa penyelewengan dana kompensasi BBM memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan dibandingkan dengan

dampak kenaikan harga BBM. Jika dilihat dari persebaran kemiskinan terlihat bahwa kemiskinan sebagian besar berada di pedesaan di wilayah Jawa. Manfaat terbesar dari Dana kompensasi BBM yang berupa beras murah dan beasiswa pendidikan dirasakan di daerah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan turun sebesar 3,51 persen menjadi 20,02 persen dengan adanya kompensasi beras murah. Sedangkan dengan kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka kemiskinan akan sebesar 4,14 persen menjadi 19,39 persen. Dampak kompensasi BBM baik beras murah relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan di daerah perkotaan yaitu 0,85 persen, sedangkan dengan kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan kemiskinan di perkotaan akan turun sebesar 1,2 persen menjadi 6,48 persen.

**Tabel 9**  
**Dampak Kenaikan BBM dan Dana Kompensasi BBM terhadap Kemiskinan**  
**(Dana Kompensasi BBM Diberikan kepada 20% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Wilayah	Kondisi Awal Kemiskinan	Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan	Dampak Dana Kompensasi BBM Terhadap Kemiskinan			
				Beras 100%	Beras 75%	Beras+SPP	Beras+SPP 75%
Kota	Jawa	8,13	8,19	7,34	7,52	6,97	7,30
	Luar Jawa	6,35	6,50	5,65	5,95	5,35	5,68
		7,60	7,69	6,84	7,05	6,48	6,81
Desa	Jawa	23,36	23,79	19,53	20,55	18,82	20,03
	Luar Jawa	22,94	23,23	20,59	21,18	20,05	20,82
		23,16	23,53	20,02	20,84	19,39	20,39
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,49</b>	<b>14,16</b>	<b>14,71</b>	<b>13,65</b>	<b>14,36</b>

Sumber: Estimasi Staf LPEM, berdasarkan Susenas 2002. Aceh, Papua, dan Maluku tidak termasuk.

\*Beras=100% artinya 20% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 20 kg.

\*Beras=75% artinya 20% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 15 kg, hal ini didasarkan fenomena di lapangan tidak semua kelompok miskin mendapatkan jumlah sebesar 20 kg.

**Tabel 10** menunjukkan bahwa jika dampak inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dibarengi dengan dampak psikologis inflasi, maka kemiskinan akan naik sebesar 0,43 persen menjadi 16,68 persen. Dampak psikologis inflasi akan menambah jumlah orang miskin sebesar 0,19 persen dari 16,49 persen menjadi 16,68 persen. Jika menggunakan skenario ini, kenaikan BBM akan menambah jumlah orang miskin menjadi 933 ribu orang. Sehingga dampak psikologis inflasi akan menambah jumlah orang miskin sebesar 412 ribu orang. Pemberian dana kompensasi BBM berupa beras murah akan menurunkan kondisi kemiskinan menjadi 14,32 persen atau turun sebesar 2,36 persen, jika terjadi penyelewengan bantuan beras murah maka kemiskinan akan menjadi 14,89 persen. Jika pemerintah memberikan kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka kemiskinan akan turun menjadi 13,82 atau turun sebesar 2,85 persen. Tetapi jika terdapat penyelewengan maka kemiskinan akan menjadi 14,53 persen.

**Tabel 10**  
**Dampak Kenaikan BBM dan Dana Kompensasi BBM terhadap Kemiskinan**  
**(terdapat Dampak Inflasi Psikologis, Dana Kompensasi BBM Diberikan**  
**kepada 20% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Wilayah	Kondisi Awal Kemiskinan	Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan* Dampak Inflasi & Dampak Psikologis	Dampak Dana Kompensasi BBM Terhadap Kemiskinan			
				Beras 100%	Beras 75%	Beras+SPP	Beras+SPP 75%
<b>Kota</b>	<b>Jawa</b>	8,13	8,30	7,44	7,61	7,09	7,42
	<b>Luar-Jawa</b>	6,35	6,59	5,77	6,05	5,49	5,78
		7,60	7,79	6,94	7,14	6,61	6,93
<b>Desa</b>	<b>Jawa</b>	23,36	24,04	19,74	20,79	19,01	20,25
	<b>Luar-Jawa</b>	22,94	23,49	20,78	21,42	20,28	21,04
		23,16	23,79	20,22	21,08	19,59	20,61
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,68</b>	<b>14,32</b>	<b>14,89</b>	<b>13,82</b>	<b>14,53</b>

Sumber: Estimasi Staf LPEM, berdasarkan Susenas 2002. Aceh, Papua, dan Maluku tidak termasuk.

\*Beras=100% artinya 20% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 20 kg.

\*Beras=75% artinya 20% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 15 Kg, hal ini didasarkan fenomena dilapangan tidak semua kelompok miskin mendapatkan jumlah sebesar 20 Kg.

\* Dampak kenaikan BBM dihitung dengan menambahkan dampak inflasi dari model CGE dan dampak psikologis. Dampak psikologis diasumsikan sama dengan dampak inflasi dari model CGE

**Tabel 11** menunjukkan bahwa jika kompensasi diberikan hanya diberikan kepada 17 persen penduduk pengeluaran terendah seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini maka kompensasi beras murah akan mengakibatkan kemiskinan turun sebesar 1,82 persen menjadi 14,67 persen (jika terjadi korupsi atau penyelewengan maka kemiskinan akan menjadi 15,17 persen). Jika kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka kemiskinan akan turun sebesar 2,28 persen menjadi 14,21 persen (jika terjadi penyelewengan maka kemiskinan akan menjadi 14,88 persen).

**Tabel 11**  
**Dampak Kenaikan BBM dan Dana Kompensasi BBM terhadap Kemiskinan**  
**(Dana Kompensasi BBM Diberikan kepada 17% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Wilayah	Kondisi Awal Kemiskinan	Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan	Dampak Dana Kompensasi BBM Terhadap Kemiskinan			
				Beras 100%	Beras 75%	Beras+SPP	Beras+SPP 75%
Kota	Jawa	8,13	8,19	7,82	7,97	7,53	7,82
	Luar-Jawa	6,35	6,50	6,19	6,33	6,01	6,20
		7,60	7,69	7,33	7,48	7,07	7,33
Desa	Jawa	23,36	23,79	20,40	21,35	19,69	20,89
	Luar-Jawa	22,94	23,23	20,71	21,28	20,20	20,94
		23,16	23,53	20,54	21,32	19,92	20,91
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,49</b>	<b>14,67</b>	<b>15,17</b>	<b>14,21</b>	<b>14,88</b>

Sumber: Estimasi Staf LPEM, berdasarkan Susenas 2002. Aceh, Papua, dan Maluku tidak termasuk

\*Beras=100% artinya 17% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 20 kg.

\*Beras=75% artinya 17% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 15 kg, hal ini didasarkan fenomena di lapangan tidak semua kelompok miskin mendapatkan jumlah sebesar 20 kg.

**Tabel 12** menunjukkan bahwa jika dampak inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dibarengi dengan dampak psikologis inflasi maka kemiskinan akan naik sebesar 0,43 persen menjadi 16,68 persen. Dengan adanya kompensasi beras murah maka kemiskinan akan turun sebesar 1,8 persen menjadi 14,87 persen (jika terjadi penyelewengan maka kemiskinan turun sebesar 1,5 persen menjadi 15,38 persen). Kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan akan menurunkan kemiskinan sebesar sebesar 2,24 persen menjadi 14,43 persen (jika terjadi penyelewengan maka kemiskinan turun sebesar 1,59 persen menjadi 15,09 persen).

**Tabel 12**  
**Dampak Kenaikan BBM dan Dana Kompensasi BBM terhadap Kemiskinan**  
**(terdapat Dampak Inflasi Psikologis, Dana Kompensasi BBM Diberikan kepada 20% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Wilayah	Kondisi Awal Kemiskinan	Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan	Dampak Dana Kompensasi BBM Terhadap Kemiskinan			
				Beras 100%	Beras 75%	Beras+SPP	Beras+SPP 75%
Kota	Jawa	8,13	8,19	7,82	7,97	7,53	7,82
	Luar-Jawa	6,35	6,50	6,19	6,33	6,01	6,20
		7,60	7,69	7,33	7,48	7,07	7,33
Desa	Jawa	23,36	23,79	20,40	21,35	19,69	20,89
	Luar-Jawa	22,94	23,23	20,71	21,28	20,20	20,94
		23,16	23,53	20,54	21,32	19,92	20,91
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,49</b>	<b>14,67</b>	<b>15,17</b>	<b>14,21</b>	<b>14,88</b>

Sumber: Estimasi Staf LPEM, berdasarkan Susenas 2002. Aceh, Papua, dan Maluku tidak termasuk

\*Beras=100% artinya 17% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 20 kg.

\*Beras=75% artinya 17% kelompok pengeluaran terbawah mendapatkan bantuan Raskin sebesar 15 kg, hal ini didasarkan fenomena di lapangan tidak semua kelompok miskin mendapatkan jumlah sebesar 20 kg.

Berdasarkan **Tabel 9** dan **11** maka dapat diperoleh gambaran bahwa pemberian kompensasi BBM sebaiknya diberikan kepada 20 persen kelompok pengeluaran terendah dibandingkan hanya memberikan kompensasi terhadap 17 persen penduduk pengeluaran terendah. Hal ini disebabkan karena pemberian kompensasi terhadap 20 persen kelas terbawah memberikan dampak pengurangan kemiskinan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kompensasi terhadap 17 persen kelas terbawah. Jika kompensasi beras murah diberikan kepada 20 persen kelompok terbawah maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 2,33 persen sedangkan kompensasi kepada 17 persen kelompok terbawah akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,82 persen. Pemberian kompensasi kepada 20 persen kelompok terbawah atau sekitar 43,4 juta orang akan mampu mengurangi penduduk miskin sebesar 0,51 persen dengan kata lain pemberian kompensasi kepada 20 persen kelompok terbawah akan menyelematkan sekitar 1,1 juta orang yang jatuh miskin akibat kenaikan harga BBM. Untuk kompensasi beras murah pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 462 milyar/tahun (4 juta orang tambahan dari 36 juta menjadi 40 juta orang) atau 1,1 juta rumah tangga x Rp. 1750 (subsidi untuk beras) x 20 kg x 12 bulan = Rp. 462 milyar/tahun.

Pemberian kompensasi terhadap 20 persen kelompok terbawah merupakan kebijakan yang sangat tepat dan adil jika dibandingkan dengan memberikan kompensasi hanya kepada 17 persen kelompok terbawah seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. Kebijakan pemerintah saat ini yang hanya memberikan kompensasi terhadap 36 juta orang miskin dirasakan kurang tepat karena tidak memperhitungkan orang-orang yang berada disekitar garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap guncangan atau kenaikan harga BBM.

### ***Sensitifitas terhadap Inflasi***

Studi ini mencoba melihat sensitifitas inflasi terhadap indeks kemiskinan dengan menambahkan dampak psikologis. Simulasi dilakukan dengan mengkalikan 2 hingga 4 kali dari dampak kenaikan harga. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dimana tidak ada perubahan *trend* dari penurunan indeks kemiskinan akibat kenaikan inflasi termasuk jika terdapat kebocoran hingga 25%.

**Tabel 13**  
**Dampak Kenaikan BBM dan Dana Kompensasi BBM terhadap Indeks Kemiskinan**  
**(Dana Kompensasi BBM Diberikan kepada 20% Kelompok Pengeluaran Terendah)**

Daerah	Wilayah	Kondisi Awal Indeks Kemiskinan	Dampak Inflasi Tanpa Psikologis		
			Setelah Kenaikan Harga BBM	Kompensasi 100%	Kompensasi 75%
Kota	Jawa	6,13	6,19	6,97	7,30
	Luar Jawa	6,35	6,50	5,35	5,68
		7,60	7,69	6,48	6,81
Desa	Jawa	23,36	23,79	18,82	20,03
	Luar Jawa	22,94	23,23	20,05	20,82
		23,16	23,53	19,39	20,39
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,49</b>	<b>13,65</b>	<b>14,36</b>
<b>Dampak Inflasi Psikologis 2x Lipat</b>					
Kota	Jawa	6,13	8,30	7,09	7,42
	Luar Jawa	6,35	6,59	5,49	5,78
		7,60	7,79	6,61	6,93
Desa	Jawa	23,36	24,04	19,01	20,25
	Luar Jawa	22,94	23,49	20,28	21,04
		23,16	23,79	19,59	20,61
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,68</b>	<b>13,82</b>	<b>14,53</b>
<b>Dampak Inflasi Psikologis 3x Lipat</b>					
Negara					
Kota	Jawa	6,13	8,48	7,18	7,53
	Luar Jawa	6,35	6,75	5,65	5,98
		7,60	7,96	6,72	7,07
Desa	Jawa	23,36	24,47	19,35	20,62
	Luar Jawa	22,94	23,75	20,54	21,31
		23,16	24,14	19,89	20,94
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>16,95</b>	<b>14,04</b>	<b>14,77</b>
<b>Dampak Inflasi Psikologis 4x Lipat</b>					
Kota	Jawa	6,13	8,60	7,28	7,60
	Luar Jawa	6,35	6,92	5,86	6,12
		7,60	8,09	6,86	7,16
Desa	Jawa	23,36	24,82	19,68	20,91
	Luar Jawa	22,94	24,00	20,76	21,56
		23,16	24,44	20,17	21,21
<b>Indonesia</b>		<b>16,25</b>	<b>17,18</b>	<b>14,26</b>	<b>14,96</b>

Sumber: Estimasi Staf LPEM FEUI, 2005

### ***Dampak Distribusi Pendapatan dari kenaikan BBM dan Program Kompensasi***

**Tabel 14** menunjukkan kondisi ketimpangan di Indonesia dengan berbagai skenario. Ketimpangan diukur dengan menggunakan *Theil's Index*. Semakin kecil angka *Theil's* maka semakin kecil akan ketimpangan yang ada. Kondisi awal ketimpangan di Indonesia adalah 0,2363 dan ketimpangan terbesar terjadi di daerah perkotaan yaitu 0,2393 sedangkan di pedesaan 0,1246. Kenaikan harga BBM mengakibatkan penurunan angka *Theil's* walaupun angka penurunannya relatif kecil. Penurunan angka *Theil's* ini disebabkan kenaikan harga BBM akan mengurangi konsumsi BBM bagi orang kaya sedangkan kondisi orang miskin tidak banyak terpengaruh. Penurunan pola konsumsi golongan atas akan mengakibatkan angka *Theil's* semakin mengecil. Dengan berbagai skenario kompensasi menunjukkan bahwa kompensasi beras murah akan menurunkan angka *Theil's* sebesar 0,0043, sedangkan kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan akan menurunkan



angka Theil's menjadi 0,0051. Penurunan ini disebabkan karena kelompok kaya akan mengurangi pola konsumsi BBM, sedangkan kelompok miskin mendapatkan tambahan pengeluaran dari kompensasi beras murah sehingga perubahan pola konsumsi ini akan menurunkan angka Theil's. Penyelewengan atau korupsi akan mengakibatkan peningkatan angka Theil's.

**Tabel 14**  
***Theil's Inequality Index***

Daerah	Kondisi Awal	Dampak Kenaikan BBM	Kompensasi Beras	Kompensasi Beras (75%)	Kompensasi Beras+SPP	Kompensasi Beras+SPP (75%)
Perkotaan	0,2393	0,2381	0,2366	0,2370	0,2362	0,2366
Pedesaan	0,1246	0,1237	0,1181	0,1194	0,1172	0,1188
Indonesia	0,2363	0,2347	0,2304	0,2309	0,2296	0,2309

Sumber: Estimasi Staf LPEM, berdasarkan Susenas 2002

## **8. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan simulasi dengan menggunakan INDOCEEM menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga BBM 2005 terhadap inflasi tidak begitu besar yaitu sekitar 0,9782 persen. Kenaikan harga terbesar terjadi pada sektor transportasi yaitu transportasi darat dan laut. Kenaikan untuk sektor transportasi ini berkisar antara 2,8 sampai dengan 4,2 persen. Sektor kedua yang mengalami kenaikan harga terbesar adalah sektor konstruksi yaitu naik 2,04 persen.
- Dampak kenaikan harga BBM 2005 terhadap komoditas kebutuhan hidup sehari-hari relatif kecil kurang dari 1 persen. Beras yang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mengalami kenaikan sekitar 0,56 persen. Sedangkan gula mengalami kenaikan harga sebesar 0,65 persen.
- Dilihat dari dampak distribusinya dan mengingat pola konsumsi BBM, membiarkan subsidi BBM akan cenderung memperburuk distribusi pendapatan (kemiskinan relatif). Pengurangan subsidi – tanpa kompensasi - akan mengurangi kemiskinan relatif tetapi akan memperbesar kemiskinan absolut yang terlihat dari kenaikan indeks kemiskinan saat harga BBM dinaikkan dari 16,3 persen menjadi 16,7 persen.
- Dengan adanya kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka kemiskinan akan turun drastis hingga menjadi 13,65 persen atau turun sebesar 2,84 persen. Jika dampak kenaikan BBM dibarengi dengan dampak psikologis inflasi maka akan memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia.
- Penyelewengan dana kompensasi BBM memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan dibandingkan dengan dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM 2005 menaikkan kemiskinan sebesar 0,24 persen, sedangkan penyelewengan dana kompensasi BBM sebesar 25 persen akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,55 persen.
- Kebijakan memberikan kompensasi terhadap 20 persen golongan pengeluaran terbawah akan memberikan dampak pengurangan yang lebih besar jika dibandingkan kompensasi diberikan kepada 17 persen kelompok pengeluaran terendah, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
- Pemberian kompensasi kepada 20 persen kelompok terbawah akan menyelamatkan sekitar 1,1 juta orang yang jatuh miskin akibat kenaikan harga BBM 2005. Jumlah tambahan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkan 1,1 juta orang yang jatuh miskin sebesar Rp. 462 milyar/tahun.

- Implikasi kebijakannya adalah : masalah dalam penyesuaian harga BBM terletak pada bagian bagaimana memastikan agar mekanisme kompensasi bisa berjalan dengan baik termasuk memastikan *coverage* yang diterima orang miskin optimum dan minimalisasi kebocoran terutama akibat korupsi.

## 9. DAFTAR PUSTAKA

- LPEM-FEUI (2003), Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik, *Laporan Riset yang tidak dipublikasikan* untuk Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Deaton, Angus, (1989), Rice Prices and Income Distribution in Thailand, A Non Parametric Analysis, *Economic Journal* 99 (395): 1-39
- Deaton, Angus and J. Muelbauer, (1980), The Almost Ideal Demand System, *American Economic Review*, 70 (3), 312-326
- Minot Nicholas and Fransisco Goletti (2000), *Rice Market Liberalization and Poverty*, Washington D.C, International Food Policy Research Institute.